

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhatian terhadap pembangunan daerah sangat besar akhir-akhir ini. Hal tersebut tampak pada perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah terhadap perencanaan pembangunan daerah terutama berkaitan dengan adanya otonomi daerah. Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional dilakukan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban berintikan demokrasi dan kedaulatan rakyat (www.hidayatullah.com). Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Perencanaan, koordinasi, dan keterpaduan antar sektor merupakan kunci pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif. Pembangunan sektoral tersebut di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Tujuan pembangunan dalam kebijakan pembangunan daerah adalah menyeraskan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan kemajuan antar daerah, melalui pembangunan serasi dan terpadu antar sektor pembangunan daerah yang

efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air (Ginandjar Kartasasmita, 1996, 336).

Secara makro pertumbuhan atau kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan daerah, dimana dalam hal ini PDRB dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan perusahaan. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tidak lepas dari peran setiap sektor-sektor ekonomi tersebut. Besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil perencanaan serta pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah.

Tabel 1.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 1993
Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan tahun 1997-2001
(Jutaan Rp)

| N O | Kabupaten/Kota | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|----------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 1.293.123 | 1.219.609 | 1.229.220 | 1.290.260 | 1.364.178 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 1.096.522 | 1.047.565 | 1.071.933 | 1.102.472 | 1.148.012 |
| 3 | Muara Enim | 2.074.328 | 2.076.756 | 1.932.536 | 2.299.039 | 2.063.755 |
| 4 | Prabumulih ¹⁾ | - | - | - | - | 282.420 |
| 5 | Lahat | 800.025 | 808.041 | 820.914 | 637.836 | 666.032 |
| 6 | Pagar Alam ¹⁾ | - | - | - | 202.142 | 212.680 |
| 7 | Musi Rawas | 882.379 | 824.166 | 649.800 | 672.999 | 484.172 |
| 8 | Lubuk Linggau ¹⁾ | - | - | - | - | 223.560 |
| 9 | Musi Banyuasin | 2.302.173 | 2.243.359 | 2.340.853 | 2.485.629 | 1.096.176 |
| 10 | Banyuasin ¹⁾ | - | - | - | - | 1.485.018 |
| 11 | Palembang | 3.301.103 | 2.923.740 | 3.057.914 | 3.219.205 | 3.376.046 |
| 12 | Bangka | 1.208.169 | 1.138.713 | 1.176.745 | - | - |
| 13 | Belitung** | 422.443 | 405.058 | 411.187 | - | - |
| 14 | Pangkal Pinang** | 188.366 | 183.580 | 186.596 | - | - |

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota Indonesia 1997-2001

¹⁾ merupakan pecahan dari kabupaten di atasnya

^{*)} membentuk propinsi baru pada tahun 2000

^{**)} bagian dari propinsi Bangka-Balitung

Pada tabel 1.1 diatas menunjukkan gambaran keberhasilan setiap kabupaten/kota di propinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program pembangunan pada daerah masing-masing yang dapat dilihat pada pertumbuhan PDRB. Pada tahun 2000 terjadi pemisahan daerah dari propinsi Sumatera Selatan yaitu Bangka, Belitung dan Pangkal Pinang yang berubah statusnya menjadi propinsi baru mempengaruhi PDRB propinsi Sumatera Selatan. Adanya pembentukan propinsi Bangka-Belitung ini diikuti dengan pemecahan wilayah kabupaten di propinsi Sumatera Selatan. Dalam menyongsong otonomi daerah dibutuhkan perencanaan yang matang dan dituntut secara aktif dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuannya sendiri tanpa tergantung pemerintah pusat. Hendaknya setiap kabupaten/kota mampu mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing dan pemerintah sebagai penggerak pembangunan harus mampu mendukung pembangunan di tiap-tiap daerahnya sehingga tujuan pemerataan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Kesempatan yang dibuka sangat luas bagi setiap daerah untuk otonomi, akhirnya juga membuat daerah-daerah yang sudah otonomi harus rela melepaskan sebagian wilayahnya. Itu pula yang dialami Kabupaten Muara Enim, yang kehilangan Prabumulih. Perpindahan Prabumulih dari Muara Enim akan membawa dampak ekonomi, yaitu berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Muara Enim yang berasal dari Prabumulih. Dari segi ekonomi, khususnya PAD, Kabupaten Muara Enim tidak akan kesulitan dengan hilangnya Prabumulih. Keberadaan tambang batu bara Bukit Asam di wilayah ini, akan tetap menjadi

motor pendorong perkembangan Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari sumbangan sektoral terhadap PDRB, yang masih menempatkan sektor pertambangan dan penggalian pada posisi teratas (kompas, juni 1999). Tiga sektor unggulan lainnya yang menunjang perkembangan kabupaten Muara Enim adalah sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, serta bangunan. Seperti pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
PDRB Kabupaten Muara Enim Atas Dasar Harga Konstan tahun 1993
Menurut Lapangan Usaha tahun 1996-2002 (Juta Rp)

| Lapangan Usaha | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pertanian | 302.079 | 286.204 | 295.497 | 304.087 | 311.930 | 329.557 | 349.890 |
| Pertambangan dan penggalian | 1.182.299 | 1.143.583 | 1.183.183 | 1.263.769 | 1.364.684 | 1.362.005 | 1.366.415 |
| Industri pengolahan | 102.426 | 46.356 | 43.153 | 45.017 | 47.423 | 49.744 | 52.279 |
| Listrik, gas dan air bersih | 21.430 | 17.368 | 18.294 | 19.209 | 20.875 | 20.544 | 20.856 |
| Bangunan | 109.383 | 88.756 | 62.520 | 64.070 | 67.850 | 72.096 | 76.950 |
| Perdagangan, hotel dan restoran | 139.320 | 97.973 | 88.741 | 93.374 | 99.079 | 104.982 | 110.917 |
| Pengangkutan dan komunikasi | 44.991 | 39.262 | 38.328 | 39.052 | 39.806 | 40.982 | 43.252 |
| Keuangan, persewaan dan jasa perus | 52.097 | 39.417 | 34.410 | 33.445 | 33.354 | 34.043 | 37.037 |
| Jasa-jasa | 77.673 | 64.079 | 62.158 | 63.158 | 64.730 | 66.112 | 68.361 |

Sumber: BPS Muara Enim 1996-2002

Krisis moneter yang melanda perekonomian nasional pada pertengahan tahun 1997, dampaknya sangat terasa hampir disemua sektor ekonomi. Pada tahun 1997 ini semua sektor mengalami pertumbuhan negatif, tidak terkecuali sektor pertambangan dan penggalian yang mempunyai peranan yang cukup dominan

bagi perekonomian kabupaten Muara Enim juga ikut terpuruk, yang paling parah sektor industri, hal ini disebabkan bahan baku yang digunakan sebagian masih diimpor, sehingga dengan adanya krisis moneter menyebabkan industri merosot tajam. Sektor-sektor yang mengalami kenaikan pada tahun 1998 berdasarkan laju pertumbuhan PDRB kabupaten Muara Enim atas dasar harga konstan tahun 1993 adalah sektor pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air bersih, serta sektor pertanian yang besarnya masing-masing adalah 3.46%, 5.33%, dan 3.25%. sedangkan sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan negatif terbesar dialami oleh sektor bangunan yaitu 29.56% disebabkan adanya penundaan beberapa proyek fisik pemerintah dampak dari krisis moneter.

Tabel 1.3
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Muara Enim Atas Dasar Harga
Konstan Tahun 1993 Menurut Lapangan Usaha tahun 1996-2003
(dalam persen)

| Lapangan Usaha | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003* |
|-----------------------------------------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|------|-------|
| Pertanian | 9.57 | (5.26) | 3.25 | 2.91 | 2.58 | 5.65 | 6.17 | 5.92 |
| Pertambangan dan penggalian | 8.74 | (3.27) | 3.46 | 6.81 | 7.99 | (0.20) | 0.32 | 0.70 |
| Industri pengolahan | 12.45 | (54.74) | (6.91) | 4.32 | 5.34 | 4.58 | 5.41 | 5.00 |
| Listrik, gas dan air bersih | 29.53 | (18.95) | 5.33 | 5.00 | 8.67 | (1.59) | 1.52 | 1.90 |
| Bangunan | 9.06 | (18.86) | (29.56) | 2.48 | 5.90 | 6.26 | 6.73 | 6.50 |
| Perdagangan, hotel dan restoran | 9.98 | (29.68) | (9.42) | 5.22 | 6.11 | 5.96 | 5.65 | 5.72 |
| Pengangkutan dan komunikasi | 11.10 | (12.73) | (2.38) | 1.89 | 1.93 | 2.95 | 2.59 | 2.88 |
| Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan | 5.85 | (25.50) | (12.70) | (2.80) | (0.27) | 2.07 | 5.04 | 3.57 |
| Jasa-jasa | 2.87 | (17.50) | (3.00) | 1.90 | 2.19 | 2.14 | 1.53 | 1.84 |

Sumber: BPS Muara Enim 1996-2003

* Angka sementara

Sebagai daerah otonomi percontohan bagi propinsi Sumatera Selatan, pemerintah daerah kabupaten Muara Enim harus jeli dalam melihat pergeseran yang terjadi dari tahun ke tahun dalam sektor-sektor ekonomi, dan lebih menggal

lagi potensi-potensi daerahnya. Tujuan akhir dari pemantauan terhadap pergeseran dalam struktur perekonomian daerah adalah naiknya pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat melalui indikator-indikator PDRB, bila itu terjadi berarti pula terjadi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik mengambil judul: **ANALISIS PERGESERAN SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 1993-2002**

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana perubahan sektor-sektor ekonomi kabupaten Muara Enim selama tahun 1993-2002?
- Bagaimana pertumbuhan sektor-sektor ekonomi kabupaten Muara Enim tahun 1993-2002 dibandingkan sektor-sektor ekonomi propinsi Sumatera Selatan berdasarkan analisis *shift share* (S-S)?

1.3. Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisis bagaimana perubahan sektor-sektor ekonomi kabupaten Muara Enim selama tahun 1993-2002
- Untuk menganalisis bagaimana pertumbuhan sektor-sektor ekonomi kabupaten Muara Enim tahun 1993-2002 dibandingkan sektor-sektor ekonomi propinsi Sumatera Selatan berdasarkan analisis *shift share* (S-S)?

1.4. Manfaat penelitian

1. Memberikan informasi sebagai bahan penjabaran ilmu ekonomi terhadap perubahan sektor-sektor perekonomian pada suatu daerah.
2. Agar dapat digunakan sebagai alat perbandingan antara yang didapat selama kuliah dengan kegiatan yang ada dilapangan.
3. Sebagai tambahan untuk penelitian lebih lanjut.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis perencanaan pembangunan yaitu *shift-share* (S-S). Tehnik analisis *shift-share* adalah suatu tehnik analisis didalam perencanaan pembangunan yang menganalisa bagaimana pangsa pasar masing-masing sektor dalam perekonomian daerah yang lebih rendah secara hirarkis tumbuh dari tahun ke tahun terhadap perekonomian daerah yang lebih tinggi secara hirarkis.

Pergeseran (*shift*) sektor-sektor perekonomian daerah dan pertumbuhan ekonominya dapat dilihat dengan membandingkan laju pertumbuhan sektor ekonomi daerah dengan daerah yang secara hirarkis lebih tinggi. Tehnik *shift-share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah yaitu pendapatan atau output sektor ekonomi daerah selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh pertumbuhan propinsi (N), pengaruh pertumbuhan propinsi disebut pengaruh pangsa (*share*), bauran industri (M), pengaruh bauran industri disebut bauran komposisi (*propotional shift*) dan keunggulan kompetitif (C),

pengaruh keunggulan kompetitif disebut *regional share*, karena itulah teknik analisis ini dinamakan teknik analisis *shift-share* (Prasetyo soepono, 1993, 44).

1.5.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada daerah Kabupaten Muara Enim, periode tahun 1993-2002

1.5.3 Jenis Data dan Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber hasil penelitian yang telah ada serta laporan-laporan dari instansi tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder:

1. Sumatera Selatan dalam angka, BPS 1993-2001
2. Muara Enim dalam angka, BPS Muara Enim 1993-2001

1.5.4 Definisi Variabel

1. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Muara Enim* adalah jumlah nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi kabupaten Muara Enim selama satu tahun tanpa melihat apakah faktor produksi berasal dari kabupaten Muara Enim atau tidak.
2. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Selatan* adalah jumlah nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi propinsi Sumatera Selatan selama satu tahun

tanpa melihat apakah faktor produksi berasal dari propinsi Sumatera Selatan atau tidak.

1.5.5 Metode Analisis Data

1. Metode Kualitatif

Yaitu metode yang didasarkan pada analisa variabel-variabel yang tidak dapat diukur atau menggunakan analisa yang sifatnya menguraikan dalam bentuk kata-kata.

2. Metode Kuantitatif

Yaitu metode yang didasarkan pada analisa variabel-variabel yang dapat dinyatakan dengan jelas atau menggunakan rumus pasti.

Dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis *shift share*. Adapun bentuk umum persamaan dari analisis *shift share* dan komponen-komponennya adalah sebagai berikut:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan : i adalah sektor-sektor ekonomi yang diteliti

j adalah wilayah yang diteliti

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pendapatan per sektor yang dikonotasikan sebagai (Y),

$$D_{ij} = Y^*_{ij} - Y_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

$$N_{ij} = Y_{ij} \cdot m \dots\dots\dots (3)$$

$$M_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - r_n) \dots\dots\dots (4)$$

$$C_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \dots\dots\dots (5)$$

Dalam r_{ij} , r_{in} , dan r_n mewakili laju pertumbuhan wilayah dan nasional yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

$$r_{ij} = \frac{(Y^*_{ij} - Y_{ij})}{Y_{ij}} \dots\dots\dots (6)$$

$$r_{in} = \frac{(Y^*_{in} - Y_{in})}{Y_{in}} \dots\dots\dots (7)$$

$$r_n = \frac{(Y^*_n - Y_n)}{Y_n} \dots\dots\dots (8)$$

Secara keseluruhan wilayah, persamaan untuk sektor i di wilayah j adalah

$$D_{ij} = (Y_{ij} \cdot r_n) + Y_{ij} (r_{in} - r_n) + Y_{ij} (r_{ij} - r_n) \dots\dots\dots (9)$$

Keterangan:

D = Variabel Wilayah

N = Efek Pertumbuhan

M = Bauran Industri

r_{ij} = Pertumbuhan Sektor i di wilayah j (kabupaten)

C = Keunggulan Kompetitif (*regional share*)

r_{in} = Pertumbuhan i di wilayah n (propinsi)

r_n = Pertumbuhan Regional

Y_{ij} = Pendapatan di sektor i diwilayah j (kabupaten)

Y_{in} = Pendapatan di sektor i ditingkat Regional

Y_n = Pendapatan Regional

Y^* = Pendapatan Tahun Terakhir Analisis

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima Bab, yaitu:

BAB I. Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode analisa, dan sistematika penulisan.

BAB II. Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Berisikan uraian mengenai gambaran penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan teori-teori yang relevan dan definisi-definisi yang berkaitan sebagai landasan dasar dari penelitian.

BAB III. Gambaran umum Objek Penelitian

Merupakan gambaran mengenai letak geografis, keadaan penduduk, Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran daerah.

BAB IV. Analisa Data.

Bab ini menjelaskan analisis data yang telah diperoleh dari BPS Sumatera Selatan, BPS Muara Enim dengan menggunakan analisis *Shift Share (S-S)*.

BAB V. Kesimpulan dan Implikasi

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil dari analisa penelitian dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II.

STUDI KEPUSTAKAAN

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini diarahkan untuk mendapatkan landasan teori dan literatur yang sesuai dengan analisis yang digunakan, dan dasar-dasar teoritis dari sumber-sumber lain yang mendukung. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Mubyarto dengan judul Prospek Sektor Ekonomi pada Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi yang dilakukan di kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan dengan menggunakan alat analisis *shift share*.

Potensi ekonomi kabupaten Kota Baru dapat dilihat dari sumbangan sektoral terhadap PDRB, yang masih menempatkan sektor pertanian pada posisi teratas, empat sektor unggulan lainnya adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor industri pengolahan.

Sektor-sektor yang mengalami kenaikan pada tahun 1998 adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran sementara sektor-sektor ekonomi lainnya mengalami penurunan. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 menunjukkan hanya tiga sektor yang mengalami pertumbuhan, yaitu pertanian sebesar 23,4%, pertambangan dan penggalian sebesar 28,0%, dan perdagangan, hotel dan restoran 16,7%, sedangkan sektor-sektor lainnya mengalami penurunan pada puncak krisis

ekonomi pada tahun 1998. Pertumbuhan negatif terbesar dialami oleh sektor bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar -53,3% disusul sektor bangunan sebesar -51,3%, sektor jasa -30,3%, sektor listrik, gas dan air bersih -27,1%, sektor pengangkutan dan komunikasi -2,8% dan sektor industri pengolahan sebesar -1,2%

Pada tingkat nasional tercatat pertumbuhan PDRB -14%. pada tahun 1998, maka kabupaten Kota Baru mencatat pertumbuhan positif pada tahun 1998, sebesar 7,64% termasuk pertambangan, dan 2,09% tanpa pertambangan. Dengan angka pertumbuhan tersebut terlihat betapa besar peranan tambang dalam perekonomian di daerah Kota Baru. Sayangnya pertambangan rakyat dan bahkan ada kemungkinan eksploitasi tambang batu bara akan ditutup. Secara absolut dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan 1993 nilainya adalah Rp.1436 miliar, naik sebesar 7,63% dari tahun 1997 sebesar Rp.1359 miliar.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sri Kusriani Tri Yunanti (1997), dengan judul Arah Pergeseran Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta berdasar analisis *shift share*. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, baik dilihat dari pengaruh bauran industri, komponen pertumbuhan nasional, maupun komponen unggulan kompetitif dari 9 sektor ekonomi ada tiga sektor di DIY yang berkembang lebih lambat dari laju pertumbuhan nasional rata-rata. Ketiga sektor itu adalah sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor jasa perusahaan. Dimana menurut Sri menjadi bukti telah terjadi pergeseran dalam posisi kontribusi terbesar dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto dari sektor pertanian ke sektor industri.

Penelitian hampir serupa juga dilakukan oleh Uha Mamluha yang menganalisis Pergeseran Ekonomi Kota Surakarta 1992-2000. Dalam struktur perekonomian Surakarta tahun 1992-1995 menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor pemimpin (*leading sector*) tetapi pada tahun 1996-2000 yang menjadi sektor pemimpin adalah sektor industri pengolahan merupakan sektor yang peranannya atau kontribusinya terhadap pertumbuhan PDRB Kota Surakarta paling besar diantara sektor ekonomi yang lain.

Secara keseluruhan tingkat pertumbuhan pendapatan sektor-sektor ekonomi Kota Suarakarta menunjukkan nilai yang positif yang artinya kontribusi pertumbuhan pendapatan sektor-sektor ekonomi kota Surakarta lebih besar dari sektor sejenis dalam propinsi Jawa Tengah. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang menjadi pemimpin yang menjadi sektor andalan dalam pembentukan PDRB Kota Surakarta selama tahun analisis 1992-2000 disusul sektor angkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa serta sektor bangunan. Perekonomian Kota Surakarta didominasi oleh sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar dalam PDRB selama 1992-2000.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah suatu tehnik atau cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai yang telah ditentukan dan dirumuskan oleh suatu Badan Perencana di tingkat pusat.

Menurut Arthur Lewis dalam bukunya yang berjudul *Development Planning* (1966) membagi perencanaan dalam enam pengertian yaitu:

1. Istilah perencanaan seringkali dihubungkan dengan faktor letak geografis, bangunan tempat tinggal, dan lainnya. Hal ini disebut dengan istilah perencanaan kota dan negara, atau perencanaan saja.
2. Perencanaan mempunyai arti memutuskan penggunaan dan pemerintah dimasa yang akan datang jika pemerintah memiliki dana untuk dibelanjakan
3. Ekonomi berencana adalah ekonomi dimana setiap unit produksi hanya memanfaatkan sumber daya manusia, bahan baku dan perlengkapan atau peralatan yang dialokasikan dengan jumlah tertentu dan menjual produknya hanya kepada perusahaan atau perorangan yang ditunjuk pemerintah
4. Perencanaan berarti setiap penentuan sasaran produksi oleh pemerintah, apakah itu untuk perusahaan negara (BUMN) atau perusahaan swasta (BUMS). Pemerintah menetapkan ini walau kadang kala hanya produk tertentu yang dianggap strategis.
5. Penetapan sasaran untuk perekonomian secara keseluruhan dengan maksud untuk mengalokasikan semua tenaga kerja, devisa, bahan mentah dan sumberdaya lainnya keberbagai bidang perekonomian
6. Perencanaan dipakai untuk menggambarkan sarana yang digunakan pemerintah untuk memaksakan sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya kepada badan usaha swasta.

Conyers & Hills mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Walaupun tidak ada kesepakatan antara para ekonom mengenai istilah perencanaan ekonomi, sebagian besar menganggap perencanaan ekonomi mengandung arti pengendalian atau pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh pemerintah pusat untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula

Menurut Muhammad Hatta, tujuan perencanaan adalah mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan jalannya. Sedangkan menurut Widjojo Nitisastro, perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal: *pertama* penentuan pilihan secara pasti mengenai tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang *kedua* adalah pilihan-pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih juga (Lincoln Arsyad, 1999, 19-21).

2.2.2 Fungsi Perencanaan

Sebagai alat untuk mencapai sasaran yang lebih baik, fungsi-fungsi perencanaan adalah sebagai berikut:

- Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahannya kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
- Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
- Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
- Dengan adanya perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan
- Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi (Lincoln Arsyad,1999,23)

Alasan perlunya perencanaan pembangunan ekonomi dilihat dari sudut pandang ekonomi adalah agar alokasi sumberdaya-sumberdaya pembangunan yang terbatas lebih efisien dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosan-pemborosan, perkembangan ekonomi lebih mantap dan berkesinambungan, stabilitas ekonomi dapat tercapai.

2.2.3 Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dibagi menjadi 4 tahap,

- *pertama*, menetapkan prioritas-prioritas tujuan untuk mengarahkan para perencana jika terjadi konflik tujuan.
- *Kedua*, mengukur ketersediaan sumberdaya-sumberdaya yang langka selama periode perencanaan tersebut

- *Ketiga*, ditetapkan proyek-proyek investasi yang termasuk dalam perencanaan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bisa merangsang perusahaan-perusahaan swasta untuk mengembangkan tujuan-tujuan pembangunan nasional.
- *Keempat*, perencanaan mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional tanpa terganggu oleh adanya kendala sumberdaya dan organisasional.

2.2.4 Macam-macam Perencanaan Pembangunan

Macam-macam perencanaan dapat dikelompokkan didasarkan pada beberapa segi yaitu:

1. Berdasarkan Jangka Waktu
 - a. Perencanaan jangka panjang (*perspektif*): rentang waktu antara 10-25 tahun. Tujuan pokok rencana perspektif adalah untuk meletakkan landasan bagi rencana jangka menengah dan jangka pendek, sehingga masalah-masalah yang harus diselesaikan dalam waktu yang sangat panjang dapat dipertimbangkan dalam jangka menengah dan jangka pendek
 - b. Perencanaan Jangka Menengah: rentang waktu 4-6 tahun. Sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah diproyeksikan dengan jelas.
 - c. Perencanaan Jangka Pendek: mempunyai rentang waktu 1 tahun, sering disebut rencana operasional tahunan. Perencanaan ini lebih akurat karena melihat masa depan dalam jangka waktu yang lebih

pendek lebih mudah daripada masa depan dalam jangka yang lebih panjang oleh karena itu penyimpangan rencana dalam jangka pendek lebih sedikit.

2. Berdasarkan Sifat Perencanaan

- a. Perencanaan dengan Komando: perencanaan dengan cara ini tidak menghendaki adanya liberalisme. Pada sistem ini penguasa pusat merencanakan, mengatur, dan memerintah pelaksana rencana sesuai dengan sasaran dan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Kelemahannya adalah tidak ada kebebasan memilih hampir sebagian besar ditentukan oleh pusat atau kecenderungan pemaksaan, tidak luwes, membutuhkan biaya yang mahal.
- b. Perencanaan dengan Rangsangan: merupakan perencanaan yang demokratis, tidak ada keharusan tetapi ajakan. Ada kebebasan tetapi tetap tunduk pada pengendalian dan pengaturan pemerintah. Kelemahannya: kemungkinan rangsangan yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen dan produsen, pelaksanaan rencana diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan pasar yang menyebabkan munculnya kelangkaan, sehingga diperlukan pengendalian harga dan pendistribusian yang hakikatnya juga merupakan bentuk komando.

3. Berdasarkan Alokasi Sumberdaya:

- a. Perencanaan Keuangan: keuangan merupakan kunci pokok dalam perencanaan ekonomi. Jika dana tersedia secara memadai, maka sasaran fisik mudah dicapai.
 - b. Perencanaan Fisik: suatu usaha untuk menjabarkan usaha pembangunan melalui pengalokasian faktor produksi dan hasil produksi sehingga memaksimalkan pendapatan dan pekerjaan.
4. Berdasarkan Tingkat Keluwesan:
- a. Perencanaan Indikatif: ekonomi campuran ala Perancis dan sama sekali berbeda dengan tipe perencanaan yang berlaku pada ekonomi campuran lainnya di dunia. perencanaan ini bersifat luwes, pada sektor ini sektor swasta tidak diawasi atau diarahkan secara ketat untuk memenuhi sasaran dan prioritas rencana. Pemerintah menyediakan segala jenis fasilitas bagi sektor swasta tetapi tidak mengarahkannya, bahkan menunjukkan tempat dimana swasta dapat berperan dalam pelaksanaan rencana tersebut.
 - b. Perencanaan Imperatif: semua kegiatan dan sumberdaya ekonomi berjalan menurut komando negara. Ada pengawasan menyeluruh oleh negara terhadap faktor produksi. Produksi barang-barang disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah.
5. Berdasarkan Sistem Ekonomi:
- a. Perencanaan Dalam Kapitalisme:
Perencanaan dalam kapitalisme dibatasi pada kegiatan pemerintah yang sifatnya mengatur sedemikian rupa untuk menghindarkan

resesi atau inflasi, untuk mencegah pemusatan monopoli, untuk menaikkan kualitas kehidupan rakyat, dan untuk menciptakan kondisi demi kelancaran fungsi mekanisme harga dengan kadar persaingan yang memadai.

b. Perencanaan dalam Sosialisme:

Perencanaan dalam sosialisme didasarkan pada rencana yang terpusat. Ada penguasa atau badan perencanaan pusat yang merumuskan rencana bagi keseluruhan. Untuk mencapai tujuannya, badan perencanaan itu memiliki dan mengawasi sendiri alat-alat produksi dan distribusi. Produksi didasarkan pada prioritas dan sasaran rencana. Perencanaan sosialis memberikan efisiensi ekonomi yang lebih tinggi karena alat-alat produksi tidak diserahkan pada kekuatan pasar.

c. Perencanaan dalam Perekonomian Campuran

Perekonomian Campuran merupakan gabungan dua sistem ekonomi yaitu kapitalisme dan sosialisme. Untuk tujuan pembangunan ekonomi sistem perencanaan ini membagi perekonomian negara kedalam sektor swasta dan sektor pemerintah. Perencanaan dalam perekonomian campuran ini menekankan pentingnya tindakan tegas pemerintah di dalam mengawasi hambatan yang ada terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa memerlukan integrasi terpusat yang melebihi birokrasinya

dan memupuk kerjasama seerat-eratnya antara dunia usaha swasta dan pemerintah.

6. Berdasarkan Cara Pelaksanaannya

a. Perencanaan Sentralistik:

Keseluruhan proses perencanaan suatu negara berada dibawah badan perencanaan pusat. Tidak adanya kebebasan ekonomi sedikit pun, semua kegiatan diarahkan dari atas. Sistem ini sering disebut *top-down planning*

b. Perencanaan Desentralistik:

Mengacu pada pelaksanaan rencana dari bawah (*bottom-up planning*). Rencana dirumuskan oleh badan perencana pusat setelah berkonsultasi dengan berbagai unit administrasi negara. Rencana pusat ini menggabungkan rencana daerah/wilayah. Pada perencanaan ini ada kebebasan berkonsumsi, berproduksi dan berusaha. Akan tetapi, badan perencana menganjurkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memberikan rangsangan tertentu kepada sektor swasta.

2.2.5 Pembangunan Regional dan Sektoral

2.2.5.1 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta

untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

2.2.5.2 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah

2.2.5.2.1 Teori Ekonomi Neo Klasik

Teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Maksudnya perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah.

2.2.5.2.2 Teori Basis Ekonomi

Faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Strategi pembangunan daerah yang muncul didasarkan pada teori ini adalah penekanan akan arti penting bantuan kepada dunia usaha. Kelemahan model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal.

2.2.5.2.3 Teori Tempat Sentral

Teori ini menganggap bahwa ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Penerapan teori ini dapat dilakukan oleh beberapa wilayah daerah yang saling bertetangga (berbatasan). Sebagian sebagai penyedia jasa dan yang lainnya sebagai daerah pemukiman.

2.2.5.2.4 Teori Kausasi Kumulatif

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari teori kausasi kumulatif ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antar daerah-daerah tersebut. Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lainnya. Hal seperti ini disebut Myrdal (1957) sebagai *backwash*.

2.2.5.3 Konsep Perencanaan Pembangunan daerah

Perbedaan tingkat pembangunan yang terjadi antar daerah mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, bila hal ini terus terjadi dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi suatu negara. Ekspansi ekonomi pada suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut. Khususnya migrasi tenaga kerja, biasanya bersifat selektif, hal ini cenderung menguntungkan bagi daerah yang mengalami ekspansi ekonomi dan merugikan daerah lainnya.

Perpindahan modal cenderung menambah ketidakmerataan. Di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Selain kerugian yang ditanggung oleh pengaruh adanya ekspansi ekonomi ini ada juga untungnya bagi daerah sekitar dimana ekspansi itu terjadi, misalnya dengan terjualnya hasil produksi daerah, adanya kesempatan kerja baru. Seperti yang dikemukakan oleh Hirschman (1958), menurutnya jika suatu daerah mengalami perkembangan maka daerah tersebut akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. Jika perbedaan antar kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (*trickling down effects*), sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi proses pengkutuban (*polarization effects*).

Bagi negara secara keseluruhan, perbedaan tingkat perkembangan daerah akan mengakibatkan perbedaan tingkat kemakmuran dalam masyarakat. Keadaan seperti itu dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan antar daerah, yang tidak jarang akan mengarah pada ketidakstabilan politik bagi negara. Bagi suatu negara, ketidakstabilan politik akan sangat merugikan terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu pemerintah perlu mengambil kebijaksanaan tertentu yang dapat mendorong pembangunan daerah-daerah miskin (Lincoln Arsyad, 1999, 303-305).

2.2.6 Analisis *Shift-Share*

Teknik analisis *shift-share* adalah suatu teknik analisis didalam perencanaan pembangunan yang menganalisa bagaimana pangsa pasar masing-masing sektor dalam perekonomian daerah yang lebih rendah secara hirarkis tumbuh dari tahun ke tahun terhadap perekonomian daerah yang lebih tinggi secara hirarkis. Dengan demikian, dapat ditunjukkan adanya pergeseran hasil pembangunan perekonomian daerah bila daerah itu memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian yang lebih tinggi secara hirarkis. Teknik ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor di suatu wilayah yang lebih rendah secara hirarkis dengan laju pertumbuhan perekonomian wilayah yang lebih tinggi secara hirarkis serta sektor-sektornya, dan mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan itu. Bila penyimpangan itu positif, hal ini disebut keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam wilayah tersebut.

Persamaan *shift-share* ini membebaskan tiap sektor wilayah dengan laju pertumbuhan yang dicapai oleh perekonomian selama kurun waktu analisis. Pada persamaan $N_{ij} = Y_{ij} \cdot m$, menunjukkan bahwa semua sektor dalam suatu wilayah hendaknya tumbuh sama dengan laju pertumbuhan nasional, yakni m .

Pengaruh bauran industri untuk sektor tertentu akan positif ($r_{in} > m$) artinya pertumbuhan pendapatan (variabel) untuk sektor tertentu lebih besar daripada pertumbuhan secara nasional. Apabila nilai menunjukkan nol ($r_{in} = m$) maka artinya pertumbuhan pendapatan untuk sektor tersebut adalah sama dengan pertumbuhan total pendapatan nasional. Pengaruh bauran industri untuk sektor i di

wilayah j lebih besar daripada pendapatan sektor i secara nasional, apabila negatif ($r_{ij} < r_{in}$) artinya pendapatan sektor i lebih kecil daripada pendapatan sektor i secara nasional.

Apabila tiap komponen *shift-share* dijumlahkan untuk semua sektor, tanda hasil penjumlahan menunjukkan proporsi pendapatan tumbuh lebih cepat/lambat ditingkat nasional. Demikian pula pengaruh keunggulan kompetitif total positif (negatif) di wilayah menunjukkan pertumbuhan pendapatan lebih cepat/lambat ditingkat nasional.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1 Letak Geografis Kabupaten Muara Enim.

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah propinsi Sumatera Selatan yang terletak antara 3° - $40^{\circ}.20'$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}20'$ - $104^{\circ}.40'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 7447.82 km^2 .

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin,
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu,
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang,
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Lahat.

Wilayah administrasi Kabupaten Muara Enim saat ini terdiri dari 19 Kecamatan dan 279 Kelurahan/Desa. Namun kini kecamatan Prabumulih Barat dan Prabumulih Timur termasuk kedalam wilayah kota Prabumulih yang telah menjadi daerah otonom sederajat dengan Kabupaten.

Kabupaten Muara Enim memiliki iklim tropis dan basah. Mengikuti iklim kebanyakan di Indonesia. Pada bulan juni sampai dengan September arah angin lebih banyak berasal dari Australia yang tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Dari bulan desember sampai maret angin pada umumnya bertiup dari Asia dan Samudera Pasifik yang melewati beberapa lautan sehingga banyak mengandung uap air.

Topografi wilayah Kabupaten Muara Enim terdiri dari atas dataran tinggi berada dibagian barat daya merupakan lereng pegunungan bukit barisan. Sebagian

lagi bertopografi dataran rendah yang terletak dibagian tengah dari utara ketimur laut wilayah Kabupaten Muara Enim. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Pembagian Topografi Kabupaten Muara Enim

| No | Ketinggian Dalam | Daerah Sebaran |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0-100 m | Sebagian kecamatan Gelumbang |
| 2. | 10 - 25 Meter | Sebagian Kecamatan Gelumbang, Ujanmas, Gunung Megang, Rambang Dangku dan Rambang |
| 3. | 100 - 500 Meter | Sebagian Kecamatan Tanjung Agung |
| 4. | 500 - 1000 Meter | Sebagian Kecamatan Tanjung Agung, Semende Darat Ulu, Semendarat Tengah dan Semende Darat Laut |
| 5. | > 1000 Meter | Sebagian Kecamatan Semende Darat Tengah dan Semende Darat Ulu |

Sumber: www.muaraenim.go.id

Muara Enim merupakan salah satu kabupaten yang kaya akan potensi bahan galian, khususnya batubara. Adanya tambang batubara di wilayah ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan perekonomian. Pengelolaan kegiatan pertambangan batubara eksploitasi dan kuasa pertambangan eksplorasi dilakukan salah satunya oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk dengan perizinan Kuasa Pertambangan. Endapan batubara tersebut tersebar di beberapa wilayah antara lain di daerah Air Laya, Muara Tiga Besar, Bukit Kendi, Klawas, Banko Barat, Banko Selatan, Banko Tengah, Suban Jeriji, Sigoyang Benuang, Talang Ubi dan Benakat Barat. Tabel berikut memperlihatkan potensi Batubara di Kabupaten Muara Enim.

Tabel 3.2
Sumberdaya Batubara Di Kabupaten Muara Enim

| No | Lokasi Pendapatan | Sumberdaya /cadangan (Ton) | keterangan |
|-----|-------------------|----------------------------|------------------|
| 1. | Air Laya | 458.835.000 | Lokasi PTBA |
| 2. | Klawas | 47.988.000 | Lokasi PTBA |
| 3. | Bangko Barat | 560.000.000 | Lokasi PTBA |
| 4. | Bangko Tengah | 789.640.000 | Lokasi PTBA |
| 5. | Bangko Selatan | 457.810.000 | Cadangan Terukur |
| 6. | Subanjeriji Timur | 325.000.000 | Cadangan Terukur |
| 7. | Subanjeriji Utara | 502.230.000 | Cadangan Terukur |
| 8. | Benakat Barat | 216.970.500 | Cadangan Terukur |
| 9. | Niru-Lematang | 296.010.000 | Cadangan Terukur |
| 10. | Sigoyang Benuang | 901.970.700 | Cadangan Terukur |
| 11. | Talang Ubi | 1.690.350.000 | Cadangan Terukur |

Sumber : www.muaraenim.go.id

Muara Enim tidak hanya kaya minyak, gas dan sumber daya batubara, tetapi juga dengan perkebunan karet, minyak sawit, kopi, pohon kelapa, buah, dan hutan industri. Perkebunan dan produk agrikultur yang mencakup produk beras menyokong kemakmuran populasi masyarakat yang tinggal di daerah ini. Aneka ragam buah-buahan musiman selalu tersedia di pasar terutama pada setiap musimnya. Durian, Duku dan Nanas paling banyak dihasilkan oleh petani Muara Enim.

3.2 Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi untuk membangun perekonomian suatu wilayah terutama sebagai penyedia tenaga kerja, sebagai konsumen, dll. Keterlibatan penduduk dalam perekonomian dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Menurut hasil sensus penduduk tahun 2001, populasi penduduk kabupaten Muara Enim sebesar 623.488 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar

314.251 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 309.237 jiwa, terlihat bahwa penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Bila dirinci per kecamatan dari 19 kecamatan, jumlah penduduk terbesar terakumulasi di kecamatan Lawang Kidul dengan jumlah total penduduk yang berada pada daerah ini sebesar 57.904 jiwa dengan tingkat kepadatan 341 jiwa/km². Urutan kedua kecamatan Gelumbang dengan total populasi penduduk sebesar 57.414 jiwa dan tingkat kepadatan 87 jiwa/km², terbagi atas 28.188 jiwa jumlah penduduk laki-laki dan sebanyak 29.226 jiwa penduduk perempuan. Selanjutnya jumlah penduduk terbesar ketiga dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 28.842 jiwa dan penduduk yang perempuan berjumlah 27.344 jiwa, total populasi penduduk di kecamatan Talang Ubi sebesar 56.186 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 115 jiwa/km². berkurangnya jumlah penduduk pada setiap kecamatan akibat adanya pemekaran daerah seperti yang telah disinggung diatas bahwa kota Prabumulih yang pada awalnya merupakan wilayah dari Kabupaten Muara Enim kini telah menjadi daerah otonom sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah populasi di Kabupaten Muara Enim.

Kecamatan Muara Enim yang sekaligus sebagai ibukota kabupaten dengan luas 194,74 km², ditempati oleh penduduk sebesar 48.338 jiwa, terbagi atas 24.367 jiwa penduduk laki-laki dan 23.971 jiwa penduduk perempuan dengan tingkat kepadatan rata-rata 248 jiwa/km². terlihat bahwa pada kecamatan ini banyak penduduk laki-laki dibanding perempuan.

314.251 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 309.237 jiwa, terlihat bahwa penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Bila dirinci per kecamatan dari 19 kecamatan, jumlah penduduk terbesar terakumulasi di kecamatan Lawang Kidul dengan jumlah total penduduk yang berada pada daerah ini sebesar 57.904 jiwa dengan tingkat kepadatan 341 jiwa/km². Urutan kedua kecamatan Gelumbang dengan total populasi penduduk sebesar 57.414 jiwa dan tingkat kepadatan 87 jiwa/km², terbagi atas 28.188 jiwa jumlah penduduk laki-laki dan sebanyak 29.226 jiwa penduduk perempuan. Selanjutnya jumlah penduduk terbesar ketiga dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 28.842 jiwa dan penduduk yang perempuan berjumlah 27.344 jiwa, total populasi penduduk di kecamatan Talang Ubi sebesar 56.186 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 115 jiwa/km². berkurangnya jumlah penduduk pada setiap kecamatan akibat adanya pemekaran daerah seperti yang telah disinggung diatas bahwa kota Prabumulih yang pada awalnya merupakan wilayah dari Kabupaten Muara Enim kini telah menjadi daerah otonom sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah populasi di Kabupaten Muara Enim.

Kecamatan Muara Enim yang sekaligus sebagai ibukota kabupaten dengan luas 194,74 km², ditempati oleh penduduk sebesar 48.338 jiwa, terbagi atas 24.367 jiwa penduduk laki-laki dan 23.971 jiwa penduduk perempuan dengan tingkat kepadatan rata-rata 248 jiwa/km². terlihat bahwa pada kecamatan ini banyak penduduk laki-laki dibanding perempuan.

Berikut disajikan secara rinci tabel yang menggambarkan populasi jumlah penduduk, tingkat kepadatan, dan luas daerah masing-masing kecamatan pada kabupaten Muara Enim tahun 2002.

Tabel 3.3
Luas Kecamatan, Jumlah populasi, dan Kepadatan Penduduk
Pada Kabupaten Muara Enim Tahun 2002

| Kecamatan | Luas (km ²) | populasi | | | Kpdtn |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Total | |
| 1. Muara Enim | 194,74 | 24.367 | 23.971 | 48.338 | 248 |
| 2. Tanjung agung | 659 | 18.026 | 17.692 | 35.718 | 54 |
| 3. Semende Darat Tengah | 277 | 5.318 | 5.384 | 10.702 | 39 |
| 4. Semende Darat Laut | 320 | 7.503 | 7.560 | 15.063 | 47 |
| 5. Semende Darat Ulu | 264 | 8.141 | 9.565 | 17.706 | 67 |
| 6. Lawang Kidul | 170,05 | 28.720 | 29.184 | 57.904 | 341 |
| 7. Ujan Mas | 265,26 | 10.721 | 10.658 | 21.379 | 81 |
| 8. Gunung Megang | 652,58 | 25.460 | 25.398 | 50.858 | 78 |
| 9. Rambang Dangku | 862,4 | 23.900 | 22.464 | 46.364 | 54 |
| 10. Rambang | 193,24 | 11.190 | 11.170 | 22.360 | 116 |
| 11. Lubai | 60 | 18.753 | 19.666 | 38.419 | 640 |
| 12. Benakat | 353,45 | 4.155 | 4.187 | 8.342 | 24 |
| 13. Talang Ubi | 489 | 28.842 | 27.344 | 56.186 | 115 |
| 14. Tanah Abang | 366 | 11.663 | 13.414 | 25.077 | 69 |
| 15. Gelumbang | 658,5 | 28.188 | 29.226 | 57.414 | 87 |
| 16. Sungai Rotan | 443,3 | 15.146 | 15.451 | 30.597 | 69 |
| 17. Penukal Utara | 275 | 6.009 | 6.721 | 12.730 | 46 |
| 18. Lembak | 206,3 | 12.802 | 13.077 | 25.879 | 125 |
| 19. Penukal Abab | 738 | 20.333 | 22.119 | 42.452 | 58 |
| Total | 7447,82 | 314.251 | 309.237 | 623.488 | |

Sumber: BPS Muara Enim Tahun 2002

Kepadatan penduduk kabupaten Muara Enim menurut tabel 3.4 diatas, wilayah yang paling padat berada pada kecamatan Lubai sebesar 640 jiwa/km² dengan luas wilayah hanya 60 km², jumlah total populasi adalah 38.419 jiwa. Sedangkan wilayah kecamatan terluas yang ada di kabupaten Muara Enim adalah kecamatan Gelumbang yaitu 658,5 km² dengan kepadatan penduduk sebesar 87 jiwa/km².

3.3 Tinjauan Perekonomian Kabupaten Muara Enim

3.3.1 Perkembangan PDRB Perkapita

Indikator lain yang sering digunakan sebagai ukuran dari tingkat kemakmuran suatu daerah adalah pendapatan perkapita. Pada tahun 2002 pendapatan Perkapita atas dasar harga berlaku (dengan migas) kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 12.670.228, naik 13,56% dibanding dengan keadaan tahun 2001 yang besarnya Rp. 11.157.048. Kenaikan tersebut belum menunjukkan daya beli masyarakat secara umum tercermin dari kenaikan PDRB Perkapita atas dasar harga konstan. Berdasarkan harga konstan (tanpa migas) kabupaten Muara Enim mengalami kenaikan sebesar 1,2% atau Rp. 36.909.

Dengan demikian meskipun secara nominal PDRB kabupaten Muara Enim meningkat tetapi secara riil daya beli masyarakat mengalami kenaikan yang relatif kecil. Hal ini terjadi oleh karena antara lain kenaikan PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku tersebut lebih dikarenakan terjadinya kenaikan harga dibandingkan oleh kenaikan produksi riil.

3.3.2. Keuangan Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah selalu diusahakan agar senantiasa selaras dengan roda pembangunan nasional. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah dapat mewujudkan otonomi daerah secara lebih merata. Kebutuhan dana untuk pembiayaan pembangunan yang makin meningkat membawa konsekuensi akan perlunya memanfaatkan lebih selektif terhadap sumber dana yang ada dan menggali sumber-sumber baru secara terus menerus guna meningkatkan penerimaan daerah. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dan berasal

dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumberdaya dana yang tercermin pada pelaksanaan APBD.

Berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah senantiasa dilakukan agar APBD dikelola secara efektif dan efisien guna mencapai sasaran pembangunan sehingga diperlukan adanya pengawasan dan pengarahannya agar pengeluaran pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Dalam hal ini perlu adanya mekanisme penyelenggaraan yang efektif, tertib dan terkendali.

3.3.3 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kabupaten Muara Enim

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah dibuat tidak lepas dari pengaruh gejolak perekonomian yang terjadi selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi berfluktuasi, namun upaya pemerintah daerah untuk tetap memberikan pelayanan umum kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah harus selalu dijaga. Kebutuhan masyarakat yang meningkat dari waktu ke waktu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan memberikan perhatian kepada perkembangan pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, hasil pelayanan dinas-dinas kepada masyarakat, dll hasil usaha daerah yang sah. Komponen-komponen pendapatan asli daerah ini secara penuh dapat digunakan untuk membiayai daerah dalam mencukupi kebutuhan dan prioritas daerah, disamping memperlihatkan adanya usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah.

Tabel 3.4
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim
2000-2001 (000 rupiah)

| Rincian | 2000 | 2001 | Perubahan (%) |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| PENERIMAAN | 145.330.420 | 355.029.781 | 130,53 |
| 1. Sisa Lebih Perhitungan Angg. Th Lalu | 29.003.292 | 55.236.123 | 90,044 |
| 2. Pendapatan asli Daerah | 8.220.784 | 20.024.268 | 143,58 |
| 3. Dana Perimbangan | 106.972.680 | 279.534.698 | 161,31 |
| 4. Penerimaan Lainnya | 1.133.664 | 234.692 | -79,30 |
| 5. Pinjaman Daerah | - | - | - |
| PENGELUARAN | | | |
| A. Rutin | 76.916.907 | 159.832.068 | 107,80 |
| 1. Belanja Pegawai | 54.787.586 | 118.164.034 | 115,68 |
| 2. Belanja Barang | 9.927.822 | 18.824.872 | 89,62 |
| 3. Biaya Pemeliharaan | 1.514.312 | 2.006.477 | 32,5 |
| 4. Belanja Perjalanan Dinas | 1.609.614 | 2.649.254 | 64,59 |
| 5. Belanja lain-lain | 2.523.620 | 7.456.662 | 195,47 |
| 6. Angsuran/Pinjaman/Hutang | 389.331 | 515.611 | 32,43 |
| 7. Bantuan Keuangan | 978.218 | 2.285.579 | 133,65 |
| 8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lainnya | 4.790.868 | 6.564.319 | 37,02 |
| 9. Pengeluaran Tidak Tersangka | 395.536 | 1.365.260 | 245,17 |
| B. Pembangunan | 35.873.088 | 109.124.213 | 204,20 |

Sumber: BPS, Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten seluruh Indonesia, 2000-2001

Dari tabel 3.4 di atas terlihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari Rp. 8.220.784 pada tahun 2000, menjadi Rp. 20.024.268 pada tahun 2001 atau terjadi perubahan kenaikan sebesar 130,53%. Laju pertumbuhan realisasi penerimaan Pemerintah Daerah kabupaten Muara Enim bukan hanya semata-mata disebabkan oleh laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi terbesar dari struktur penerimaan daerah diberikan oleh sumbangan dan bantuan. Dana perimbangan menunjukkan perubahan peningkatan sebesar 161,31% pada tahun 2001 bila dibandingkan tahun sebelumnya. Namun terjadi penurunan yang cukup berarti dari penerimaan lainnya sebesar -79,30%.

Pengeluaran daerah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, juga terjadi kenaikan. Pengeluaran rutin yang terdiri dari sembilan komponen diantaranya Belanja pegawai, Belanja lain-lain, Bantuan keuangan, Pengeluaran tidak tersangka, dll. Sedangkan pengeluaran pembangunan dirinci menurut sektoral yang merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai berbagai proyek di berbagai sektor. Pada tahun 2001 Perubahan kenaikan yang cukup besar terjadi pada posisi pengeluaran tidak tersangka sebesar 245,17%. Persentase perubahan untuk Belanja Lain-lain menduduki urutan kedua tertinggi terhadap total pengeluaran rutin yaitu sebesar 195,47%. Pengeluaran lainnya yang masih cukup besar kontribusinya perubahannya adalah bantuan keuangan sebesar 133,65%. Secara keseluruhan terjadi peningkatan persentase perubahan pada masing-masing komponen pengeluaran rutin. Sementara itu dari sisi pengeluaran pembangunan persentase perubahan juga mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 204,20%.